

Tabel 1 : Evaluasi Pencapaian Kinerja RKP 2026
(Secara Matriks PRPFMM Tahunan)

Kementerian / Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal																		
KL	PROG	RES	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW 1 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW 2 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW 2 2025 (Jan s.d. Juni) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH DISELENG (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW 1 2026 (Jan s.d. Mei) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW 2 2026 (Apr s.d. Juni) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																		
										446,430,570,000				446,033,340,000	102,903,614,923	119,086,452,481		
005	WA			Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan	1. Tingkat Maturlitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.7 (level)	-	3.210 (Tahun 2025)							Penilaian SPIP Tahun 2026 saat ini masih dalam proses pelaksanaan, sehingga Tingkat Maturlitas SPIP Tahun 2026 belum ditetapkan. Tingkat Maturlitas SPIP Tahun 2025 adalah 3.210. Kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam penilaian SPIP Tahun 2026 adalah: 1. Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2026 (Pengisian Kertas Kerja SPIP dan Pemenuhan Bukti Dukung) 2. Pengisian Kualitas SPIP Tahun 2026 3. Penetapan Tim Unit Pengelola Risiko Eselon 1 dan Tim Manajemen Risiko Eselon 2 4. Pelaksanaan Audit Internal 5. Penilaian atas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 6. Penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan tercapai pada TW IV Tahun 2026 7. NKA di Trimester II adalah 47,09 8. Hasil penilaian IHN akan diumumkan pada TW III 9. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan tercapai pada TW IV 10. Nilai evaluasi kelembagaan akan tercapai pada TW IV 11. Indeks sistem merit akan tercapai pada TW IV	Terdapat pemenuhan dalam penerapan manajemen risiko berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SPIP Tahun 2025, serta adanya model pada Tim Manajemen Risiko. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan teknis (Bimtek) yang lebih mendalam bagi APP dan Tim Manajemen Risiko untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi manajemen risiko yang optimal.	
						2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP (Opini)	WTP (Opini)	-									
						3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77.16 (Nilai)	-	-									
						4. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	86.62 (Nilai)	36,38	47,09									
						5. Indeks Reformasi Hukum	98.97 (Nilai)	-	-									
						6. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	2.8 (Indeks skala 4)	-	-									
					Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta layanan yang dinamis, inovatif, dan profesional	1. Nilai evaluasi kelembagaan	89.25 (Nilai)%	-	-									
					Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional	1. Indeks sistem merit	290 (Indeks)	-	-									
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA										446,033,340,000				446,033,340,000	102,903,614,923	119,086,452,481		
005	WA	3204	Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM							199,117,000				199,117,000	23,428,100	92,058,641		
					Meningkatnya efektivitas layanan audit Internal	1. Nilai Internal Audit Capability Model	3.06 (Nilai)	-	-								Per TW II, saat ini sedang dilaksanakan tindak lanjut atas hasil Penilaian Kapabilitas APPP Tahun 2025, Penilaian Kapabilitas APPP Tahun 2026 belum dilaksanakan. Telah dilaksanakan Evaluasi AKIP Satuan Kerja Tahun 2023 pada TW II. Akan hasil evaluasi AKIP, Satuan Kerja saat ini sedang melaksanakan tindak lanjut rekomendasi secara	Terdapat proses bimtek/kegiatan pengawasan Inspektorat yang belum diselesaikan oleh pedoman/SOP, sehingga saat ini
						2. Persentase rekomendasi LHE AKIP Internal yang ditindaklanjuti	75%	-	-									
						3. Persentase rekomendasi revisi Laporan Keuangan yang telah ditindaklanjuti	100%	-	100%									
						4. Persentase jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan audit Internal yang ditindaklanjuti	80.10%	-	-									
					Meningkatnya kualitas layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah												Per TW II, Revisi atas Laporan Keuangan yang telah dilaksanakan adalah: 1. Revisi atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 (Jadwalkan) 2. Audit Internal yang telah dilaksanakan per TW II adalah: 1. Pemeriksaan Fisik Barang persediaan Aset Tulis Kantor (ATK) dan Mekanism Elektrikal (MEI) Tahun 2025 2. Pemeriksaan Fisik Barana Pengadaan Obat Tahun 2026	
						1. Indeks kualitas layanan audit Internal	3.50 (Indeks skala 4)	-	-								Indeks kualitas layanan Audit Internal ditinjau berdasarkan hasil survei kinerja yang dilaksanakan di akhir tahun berdasarkan layanan assurance dan consulting yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat. Layanan Inspektorat yang telah dilaksanakan per TW II adalah: 1. Pendampingan Pelayanan LUKPM Tahun 2025. 2. Pelaksanaan Revisi atas Usulan Revisi Anggaran TA 2026 3. Revisi atas Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2025 4. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI 5. Asistensi Aamling dan Perbaikan Pengadaan 6. Fasilitas Pengawasan BPKP 7. Asistensi Konsultasi atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja 8. Pembenihan misakan atas penyusunan (perubahan regulasi) Peraturan, Keputusan, dll) 9. Fasilitas palaporan penerimaan gratifikasi 10. Fasilitas Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI 11. Pendampingan Pengujian Zone Integrasi	
005	WA	3205	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal							427,297,117,000				427,297,117,000	96,855,436,420	114,635,731,311		
					Meningkatnya efektivitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan penanaman modal	1. Indeks Pengelolaan Aset	3,72 dari Skala 4	-	-								Penilaian capaian atas Indeks Pengelolaan Aset akan dilaksanakan di akhir tahun	
						2. Persentase laporan keuangan yang tersusun secara baik sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	-	50.00%								Penyempaian Laporan Keuangan 2025 Audited Disampaikan pada bulan Mei sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2026 dilaksanakan pada TW II	
						3. Nilai Hasil Pengawasan Keuangan	73 (Nilai)	-	-								Penilaian capaian atas Indeks Pengelolaan Aset akan dilaksanakan di akhir tahun	
						4. Indeks Tata Kelola Pengadaan	55 (Indeks)	-	-								Penilaian capaian atas Tata Kelola Pengadaan akan dilaksanakan di akhir tahun	
						5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (BKPA)	88 (Nilai)	-	-								Perhitungan RPA dilakukan setiap bulan, akan tetapi penilaian akhir ditetapkan pada akhir tahun	
					Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan penanaman modal	1. Indeks kepuasan layanan umum dan keuangan	3.53 dari Skala 4	-	-								Pelaksanaan survey untuk penilaian indeks kepuasan layanan umum dan keuangan dilaksanakan di akhir tahun	

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW II 2025 (Jan. s.d. Juni) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EPISODI (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW I 2026 (Jan s.d. Mei) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW II 2026 (Apr. s.d. Juni) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI	
KL	PROG	KEG															
065	WA	3208	Pengembangan Sumber Daya Manusia						837,095,000				837,095,000		160,043,000	356,394,500	
				Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal dan hilirisasi	1. Berantusias ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional, struktural dan teknis serta memiliki sertifikat kelulusan	91%	25,9%	39,23%								Capaian Kinerja berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	tidak ada
					2. Berantusias ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang penanaman modal dan hilirisasi di pusat dan daerah yang lulus sesuai dengan kriteria	91%	-	45,34%								Capaian Kinerja berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan	tidak ada
065	WA	3210	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM						333,500,000				333,500,000	59,327,500		182,314,700	
				Meningkatnya efektifitas perencanaan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi	1. Nilai rata-rata LHE AKSP Internal	76,97 (Nilai)	-	-								Capaian kinerja akan tercapai pada Triwulan IV	-
					2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	79,21 (Nilai)	5,68	5,36								di Triwulan II NKPA adalah 5,36	
065	WA	6774	Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal						443,178,000				443,178,000	75,437,800		195,547,950	
				Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal	3,52 dari Skala 4	Akan diisi pada akhir tahun sesuai hasil survei tahunan	Akan diisi pada akhir tahun sesuai hasil survei tahunan								Hingga akhir TW II Tahun 2026 terdapat satu peraturan yang telah disundung yaitu: Permen tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian/BKPM	-
				Meningkatnya efektifitas pelayanan advokasi hukum penanaman modal	1. Meningkatkan efektifitas pelayanan advokasi hukum penanaman modal	100%	-	Akan diisi pada akhir tahun sesuai pencapaian kinerja								Terdapat pula beberapa peraturan yang sedang disusun yaitu: - RPermen tentang Klasifikasi Asrisp - RPermen tentang Jadwal Refresi Asrisp - RPermen tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Asrisp Dinamis - Raperpres Rencana Umum Penanaman Modal - Raperpres Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis - Rapermen Perubahan Permen RBKM - Rapermen tentang Penilaian Kinerja PISP dan Kinerja PPS Pemda serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Usaha KIL	
065	WA	6776	Meningkatkan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat						15,699,412,000				15,699,412,000	5,536,290,707		3,510,159,134	
				Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan, kehumasan dan keterbukaan pimpinan	1. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan keprotokolan, kehumasan dan keterbukaan pimpinan	3,57 (Indeks)	Akan diisi di akhir tahun sesuai hasil survei tahunan level eselon II.	Akan diisi di akhir tahun sesuai hasil survei tahunan level eselon II.								Akan diisi di akhir tahun sesuai hasil survei tahunan level eselon II.	
				Meningkatnya partisipasi dan akses informasi publik melalui pengelolaan informasi yang terbuka	1. Persentase opini negatif dihindari total pemberitaan tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada media	11,5%	3,00%	2,00%								Persentase opini negatif dihindari total pemberitaan tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada media* memiliki target sebesar 11%. Pada Triwulan II (April-Juni), realisasi persentase opini negatif tercatat sebesar 2%, atau jauh lebih rendah	
065	WA	7903	Pembinaan Perusa Kelola Penanaman Modal						246,670,000				246,670,000	27,611,137		17,317,500	
				Meningkatnya kualitas pembinaan jabatan fungsional penanaman modal	1. Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional penanaman modal	3,10 (Indeks)	-	Akan diisi di akhir tahun sesuai hasil survei tahunan								Capaian Kinerja dilakukan di akhir tahun	-
				Meningkatnya implementasi dan efektifitas pembinaan jabatan fungsional penanaman modal	1. Persentase Pembinaan Jabatan Fungsional Perusa Kelola Penanaman Modal yang diimdanisasi	76%	-	40,00%								Telah dilakukan perhitungan kebutuhan/formasi jabatan Fungsional Perusa Kelola Penanaman Modal dan Diseminasi kebijakan pembinaan jabatan Fungsional di wilayah Indonesia Timur	Indonesia wilayah Timur belum sepenuhnya terjangkau dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan kapasitas SDM
065	WA	7902	Penastabilan Sumber Daya Manusia dan Organisasi						374,481,000				977,251,000	166,041,019		95,928,949	
				Meningkatnya efisiensi dan efektifitas lembaga melalui evaluasi dan penataan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)	100%	-	0,00%								-	Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2024, indikator Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) memperoleh nilai 100% (maksimal). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi telah memenuhi seluruh kriteria penilaian yang ditetapkan. Sumber data: evaluasi/daops.go.id
					2. Nilai Penerapan Penguasaan Sistem Kerja	3 (Nilai)	-	0,00%									Pada tahun 2026, terdapat penilaian kapabilitas kelembagaan, yang didalamnya terdapat aspek ketepatan ukuran yang memuat sub-indikator penyederhanaan. Pelaksanaan penilaian kapabilitas kelembagaan s.d. TW II TA 2026 baru sampai pada tahapan penilaian mandiri sehingga belum terdapat hasil capaian realisasinya. Capaian realisasi dijadwalkan pada TW IV Tahun 2026.
				Meningkatnya kualitas layanan sumber daya manusia berbasis meritokrasi	1. Indeks kepuasan layanan sumber daya manusia dan organisasi	3,51 (Indeks skala 4)	3,7 (Indeks skala 4)	3,7 (Indeks skala 4)								Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) menargetkan peningkatan tingkat penerapan Sistem Kerja dari nilai 3 (Kategori VI) pada hasil evaluasi sebelumnya menjadi nilai 4 (Kategori II) pada Tahun 2026.	
																Target peningkatan tersebut akan diwujudkan pada TW IV Tahun 2026 dan difokuskan pada penyelesaian dan penerapan penguatan sistem kerja, implementasi squad team secara efektif, serta penguatan pola kerja kolaborasi lintas fungsi untuk mempercepat pencapaian kinerja organisasi.	
																Hasil SKM Biro SDMO TW II TA 2026 tersebut belum mencapai tingkat maksimal dan masih terdapat penilaian yang perlu ditingkatkan terutama pada unsur waktu, kemudahan prosedur dan sarana prasarana. Oleh karena itu dilakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan melalui perbaikan pada unsur layanan yang dinilai relatif lebih rendah.	
PROGRAM PENANAMAN MODAL DAN HILIRISASI																	
065	ED								405,576,415,000				405,571,645,000	34,414,753,485		25,995,331,765	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan	1. Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	3,41 (Indeks Skala 4)	-	-								Akan diisi pada Triwulan IV Tahun 2026	-
					2. Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal	3,41 (Indeks Skala 4)	-	-								Akan diisi pada Triwulan IV Tahun 2026	-
					3. Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektor	3,41 (Indeks Skala 4)	-	-								Akan diisi pada Triwulan IV Tahun 2026	-
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Berkelanjutan Iklim Penanaman Modal	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal	3,41 (Indeks Skala 4)	-	-								Akan diisi pada Triwulan IV Tahun 2026	-
				Meningkatnya tata kelola lingkungan, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	1. Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang diimdanisasi	80,5%	5%	10%								Progress rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal masih dalam proses	-
					2. Persentase realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	32,05%	7,5%	4,01%								dari target realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 5,25%	-
					3. Persentase peningkatan profil penanaman modal dan hilirisasi di daerah yang diimdanisasi	11%	1%	1%								Persentase peningkatan profil penanaman modal dan hilirisasi di daerah yang diimdanisasi	-
				Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal	1. Berantusias Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal dalam dan luar negeri yang disepakati	100%	55,97%	67,50%								1. Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) a. MoU dan PKS antara Kementerian/BKPM dan Pemprov Bali pada 1 Januari 2026 b. MoU/ NK antara Kementerian/BKPM dengan HSBC Bank pada 6 Maret 2026 c. MoU/ NK antara Kementerian/BKPM dengan Bank BRI pada 3 Maret 2026 d. MoU/ NK antara Kementerian/BKPM dengan WAFAP pada 10 Februari 2026 e. MoU/ NK antara Kementerian/BKPM dengan KP2M pada 11 Maret 2026 f. PKS antara Kementerian UMM dan Kementerian pada 26 Mei 2026 g. MoU between The Ministry of Investment And Downstream Industry/Investment Coordinating Board Of The Republic of Indonesia And The Federal Department of Economic Affairs, Education And Research Of The Swiss Confederation On Enhanced Cooperation In The Minerals And Metals Sector pada 23 Juni 2026 2. Menghadiri Relay Meeting ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) 3. SDGM 2027 and Related Meetings 4. Regional Capacity Building Workshop: Handbook on Obligations in International Investment Treaties for Indonesia di Jawa Barat 5. 19th ACAPTA TNC and Related Meetings 6. Regional Capacity Building Workshop: Handbook on Obligations in International Investment Treaties for Indonesia di Sumatera Utara	-

KODE	PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW II 2025 (Jan. s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EPISODI (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW I 2026 (Jan. s.d. Mei) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW II 2026 (Apr. s.d. Jun) (Rp)	PENYELESAIAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
			Meningkatnya kualitas potensi penanaman modal dan hilirisasi di daerah	1. Persentase daerah yang data potensi penanaman modal dan hilirisasi yang termutakhirkan sesuai kriteria	100%	42,4% (14 Daerah)	36,8% (14 Daerah)							Sampai dengan periode TW II 2026, progress pemutakhiran data profil dan potensi daerah pada Website PIR telah mencapai 83,2% atau telah terupdate sebanyak 32 daerah. Pada TW II sendiri telah dilakukan pemutakhiran progress pemutakhiran sebesar 36,8% atau sebanyak 14 daerah. Pemutakhiran data dilakukan melalui koordinasi secara tatap muka bersama kunjungan Penda yang datang ke kantor Kemeninvesti/BKPP maupun secara daring melalui zoom meeting dengan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Adanya perubahan personal admin PIR di daerah menyebabkan diperlukannya penyesuaian dan adisition kembali bag daerah dalam melakukan pemutakhiran data website PIR.
065	ED	3215	Pembendayaan Usaha Nasional	Meningkatnya kemitraan PMA/PMDN dengan UMMU	1. Berencana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencapai Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) dengan Usaha Besar (UB) terhadap UMMU yang difasilitasi	25,00%	21,5%	2,641,453,000			2,641,453,000	272,309,048	648,999,024		
			Meningkatnya kualitas fasilitas Kemitraan Antara PMA/PMDN dengan UMMU	1. Persentase Pelaku UMMU yang telah dilakukan pengoptisan kapasitas untuk mendukung rantai pasok Usaha Besar (UB)	100%	-	-							Pada periode Triwulan II Tahun 2026, persentase UMMU yang berhasil mencapai Kesepakatan kemitraan usaha dengan Usaha Besar diharapkan dengan total UMMU yang telah difasilitasi tercatat sebesar 21,40%. Persentase tersebut diperoleh dari perbandingan antara nilai komitmen kemitraan yang telah ditandatangani oleh Usaha Besar mencapai Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) dengan total nilai kemitraan yang telah ditandatangani (SPK) hingga periode tersebut. Nilai KKU tercatat sebesar Rp0,38 triliun, sedangkan nilai SPK mencapai Rp2,72 triliun.	Terdapat Usaha Besar yang memiliki timeline proyek mundur dari rencana investasi sehingga pelaksanaan kemitraan dengan UMMU juga mundur atau belum direalisasikan
REPUTASI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL															
065	ED	3216	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal	Terdapatnya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas	1. Bilal rencana penanaman modal dari promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	Rp. 1,850,9 Triliun	Rp. 388,6 Triliun	Rp. 413,8 Triliun			46,064,801,000	28,238,091,939	9,240,824,984		
				2. Investor potensial yang mengedahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (NKO)	130 Investor Potensial	33 Investor Potensial	167 Investor Potensial							Capaian sampai bulan Juni 2026	Kondisi ekonomi global dan domestik memengaruhi keputusan serta rencana ekspansi investor. Selain itu,
				3. Berencana perusahaan asing yang berhasil difasilitasi untuk melakukan relokasi atau diversifikasi geografis ke Indonesia	100%	-	-							Capaian sampai bulan Juni 2026	Ketidakpastian kondisi ekonomi global memengaruhi proses pengambilan keputusan investasi. Efisiensi anggaran
				4. Berekas kualitas strategi promosi penanaman modal	3,6 Indeks	-	-							Dalam tahap fasilitas perusahaan	Investor cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan relokasi atau diversifikasi usaha karena
			Terdapatnya promosi investasi sektor hilirisasi yang efektif	1. Nilai Rencana Penanaman Modal di sektor hilirisasi	Rp. 1,115,6 Triliun	-	-							Dalam tahap penyelesaian hasil kajian 2025	Pengumpulan indeks dilakukan pada akhir tahun setelah proses penyelesaian dan implementasi hasil kajian
														Indikator tersebut akan diumumkan untuk dihipunkan pada target output tahun ini karena tidak ada anggaran RP dibelanjakan	diusulkan untuk dihipunkan
065	ED	6778	Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	Terdapatnya kualitas promosi yang efektif di Wilayah Amerika dan Eropa	1. Bilal rencana penanaman modal di Wilayah Amerika dan Eropa	Rp 182,8 Triliun	Rp. 109.332.978.290.676	Rp. 106.218.244.957.357,-	4,774,881,000		4,774,881,000	2,615,184,281	242,321,837		
															Nilai rencana penanaman modal di Wilayah Amerika dan Eropa pada : - Bulan April sebesar Rp. 26.612.616.882.856,- - Bulan Mei sebesar Rp. -0.484.005.193.149,- - Bulan Juni sebesar Rp. 39.121.122.881.332,-
															Kegiatan diperoleh dari fasilitas perusahaan dan kunjungan kerja pada bulan: Apr : Kegiatan Fasilitas Perusahaan LCB dengan BARANTIRA, ANIM, PT CCL Label Indonesia, dan PT Antardaya Mutia Jaya Indonesia Mei : Kegiatan Fasilitas Perusahaan Coca cola, Siemens Energy, Hornel Prousa, Cargill, Diwan2, Michelin, dan WFO Juni : Kegiatan Fasilitas Perusahaan Engho Group, Carlsat Holding GmbH, H2 Power,
065	ED	6779	Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Terdapatnya kualitas promosi yang efektif di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika	1. Nilai rencana penanaman modal di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Rp 705,2 Triliun	Rp236,6 Triliun	Rp305,70 Triliun	2,948,192,000		2,948,192,000	325,758,866	771,607,326		
															Sampai dengan periode triwulan I (Januari - Juni) Tahun 2026 capaian pengawalan nilai rencana investasi yang diperoleh melalui pemanfaatan berbagai kegiatan promosi penanaman modal di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika adalah sebesar Rp542,30 Triliun.
065	ED	6780	Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	Terdapatnya kualitas promosi yang efektif di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik	1. Nilai rencana penanaman modal di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik	Rp 788,7 Triliun	Rp 126,096,5 Milliar	Rp 313,444,4 Milliar	4,475,861,000		4,475,861,000	121,994,514	535,725,656		
															Melupakan nilai rencana investasi penanaman modal dari pelaku usaha yang telah difasilitasi baik secara online maupun offline di Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik
REPUTASI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL															
065	ED	3220	Pemeringkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berasamaan Modal	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan kerja sama pelaksanaan berusaha	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha yang diimplementasikan	60%	15%	45,00%			3,551,816,000	265,461,800	498,240,622		
															Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah
															1. Persiapan (Januari – Maret) 2. Kick-off Meeting (April) 3. Training of Trainers (April) 4. Sosialisasi dan Workshop (April) 5. Penilaian Mandiri (Mei) 6. Verifikasi dokumen dan Verifikasi Lapangan (Mei – Juni)
			Meningkatnya implementasi Kerjasama Pelaksanaan Berusaha di Bidang Penanaman Modal	1. Persentase Pemerintah Daerah dan K/L yang telah melaksanakan rekomendasi kinerja Penyelenggaraan PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	62,5%	15%	45,00%								Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah
															1. Persiapan (Januari – Maret) 2. Kick-off Meeting (April) 3. Training of Trainers (April) 4. Sosialisasi dan Workshop (April) 5. Penilaian Mandiri (Mei) 6. Verifikasi dokumen dan Verifikasi Lapangan (Mei – Juni)
065	ED	6482	Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal	1. Persentase kerja sama penanaman modal dengan mitra kerja sama dari dalam dan luar negeri yang diapakai	100%	83,3%	116,67%	544,067,000		544,067,000	38,083,400	129,424,442		
															Pada triwulan ke - 2 Tahun 2026, unit kerja telah mencapai target output sebanyak 7 dokumen kesepakatan (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama) dengan berbagai mitra dari target sebanyak 8 kesepakatan. Hal ini berarti pada triwulan II tahun 2026, unit kerja telah mencapai output lebih dari 100% Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman dan PKS (Perjanjian Kerja Sama): 1. Penandatanganan MoU dan PKS antara Kemeninvesti/ BKPP dan Pemerev Bali pada 1 Januari 2026 2. Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman antara Kemeninvesti/ BKPP dengan HSBC Bank pada 6 Maret 2026 3. Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman antara Kemeninvesti/ BKPP dengan Bank BRI pada 1 Maret 2026 4. Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman antara Kemeninvesti/ BKPP dengan WAFI pada 13 Februari 2026 5. Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman antara Kemeninvesti/ BKPP dengan OFPM pada 11 Maret 2026 6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian UMMU dan Kemeninvesti pada 26 Mei 2026 7. MoU between The Ministry Of Investment And Downstream Industry/Investment Coordinating Board Of The Republic Of Indonesia And The Federal Department Of Economic Affairs, Education And Research Of The Swiss Confederation On Enhanced Cooperation In The Minerals And Metals Sector pada 23 Juni 2026

KODE	KL	PROG	KEG	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2025 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2025 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Jan-Mar)	REALISASI ANGGARAN TW II 2025 (Jan-Apr)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EPISODI (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2026 (Jan-Apr)	REALISASI ANGGARAN TW II 2026 (Apr-Jun)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
						2. Peningkatan kesepakan/perjanjian/rekomendasi kebijakan kerja sama bilateral di bidang penanaman modal yang telah ditandatangani	75.5%	-	46.67%							Pada bulan ini unit kerja telah mencapai target output sebanyak total 14 dokumen: - 8 kesepakatan bahan posisi (dari target 11 kesepakatan) - 6 kesepakatan hasil perundingan (dari target 19 kesepakatan) atau sebanyak 46.67% Bahan posisi : 1. penyusunan bahan posisi perundingan putaran ke 4. Indonesia - GCC FTA (14 Januari 2026) 2. penyusunan bahan posisi dan Takti BT Indonesia - Turki (15 Februari 2026) 3. Penyusunan bahan posisi dalam rangka interaksi BT Indonesia - Tanzania (1 April 2026) 4. Penyusunan bahan posisi dalam rangka perundingan putaran ke - 1. BT Indonesia - Turki (6 - 7 April 2026) 5. Penyusunan bahan posisi dalam rangka preliminary perundingan BT Indonesia - Mozambique (4 - 7 April 2026) 6. Penyusunan bahan posisi dalam rangka preliminary Indonesia - Chile CEPA (8 April 2026) 7. Rapat Audiensi dalam rangka penyelesaian pending issues dalam Investment Chapter pada Indonesia - GCC FTA (tanggal 24 Juni 2026) 8. Rapat Penyusunan bahan posisi dalam rangka perijinan Perundingan putaran ke - 2 BT RI - Turki (tanggal 21 Juni 2026) perundingan : 1. Perundingan putaran ke 4 untuk Investment Chapter pada I - GCC FTA (19 - 22 Januari 2026) 2. Perundingan Preliminary BT Indonesia - Turki (9 Maret 2026) 3. Perundingan Interaksi BT RI - Tanzania (7 - 10 April 2026) 4. Perundingan Putaran pertama BT RI - Turki (27 - 30 April 2026) 5. Perundingan Putaran ke - 2 BT Indonesia - Turki (30 Juni - 2 Juli 2026) 6. Melakukan Preliminary Perundingan Investment Chapter Indonesia - Chile CEPA (tanggal 8 April 2026)	
065	ED	6483		Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya implementasi kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal	1. Peningkatan kesepakan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal yang disetujui	100%	38.6%	73%	817,829,000			817,829,000	141,144,400	162,048,716	1. Perlemasan SLOM 2/57 and Related Meetings pada tanggal 25-31 Mei 2026 secara virtual; 2. 234 ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) Joint Committee (JC) Meeting and Related Meetings di Melbourne, Australia pada tanggal 23-26 Juni 2026	Efisiensi anggaran dan kebijakan yang hanya membolehkan pengumuman anggaran luar negeri dipukul untuk pendampingan Rapat Menteri Investasi/Rapat BOPN, sehingga perundingan dan forum yang bersifat substantive dan technical tidak dapat dihadiri secara optimal
						2. Peningkatan kesepakan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal yang telah ditandatangani	75.5%	27.3%	87.5%							1. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Regional dan Multilateral pada tanggal 1 April 2026 2. Laporan Perijinan Bahan Posisi Delir pada Rangkaian Pertemuan OECD 50th Anniversary on RBC Week pada tanggal 18 Juni 2026	Efisiensi anggaran membuat anggaran untuk pelaksanaan rapat bahan posisi secara Risk menjadi sangat berkurang, sehingga kebanyakan rapat dilaksanakan secara virtual.
						3. Peningkatan minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi ke luar negeri (Outward Investment)	64.6%	-	-								Efisiensi anggaran membuat anggaran untuk pelaksanaan forum Outward Investment menjadi sangat minim
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL									9,597,611,000				10,297,611,000	574,735,916	2,590,224,117		
065	ED	3225		Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha	Meningkatnya efektivitas dan harmonisasi pelayanan fasilitas berusaha	1. Peningkatan usulan pemberian fasilitas berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan)	92%	68.13%	66.17%	848,176,000			1,048,176,000	301,049,386	215,777,819		
						2. Peningkatan rekomendasi hasil harmonisasi/ koordinasi tata cara pelayanan fasilitas berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan) yang ditandatangani	92%	57.69%	57.69%							Duta TW II (April-Juni 2026) Jumlah usulan KMK Insentif Kepabeanan (Masterlist) yang telah diverifikasi oleh Direktorat SA KMK (dari dari circular): Jumlah permohonan Insentif Kepabeanan (Masterlist) yang masuk melalui sistem OSS: 115 permohonan Jumlah usulan KMK Insentif Perpajakan (TA & TH) yang telah diverifikasi oleh Direktorat: 22 KMK (TH 13, TA 9) Jumlah permohonan Insentif Perpajakan (TA & TH) yang masuk melalui sistem OSS: 18 permohonan (TH 9, TA 9) Peningkatan Usulan Fasilitas Berusaha TW II (April-Juni 2026) Duta TW II (April-Juni 2026) (A) Jumlah permohonan yang masuk yang memerlukan harmonisasi/koordinasi dengan instansi teknis terkait: 26 permohonan (B) Jumlah permohonan masuk yang ditandatangani dengan harmonisasi/koordinasi: 26 permohonan (C) Jumlah permohonan masuk yang tidak ditandatangani dengan harmonisasi/koordinasi: 0 permohonan (X) Jumlah permohonan yang ditandatangani yang dapat target ke penerbitan persetujuan fasilitas berusaha: 15 permohonan (Y) Jumlah permohonan yang ditandatangani yang tidak dapat target ke penerbitan persetujuan fasilitas berusaha: 11 permohonan Peningkatan rekomendasi hasil harmon TW II (April-Juni 2026) A=48,136,000+144,280+10,000=162,416	
065	ED	5264		Penyempurnaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP Pusat)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP Pusat) di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPM	1. Berencana peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada PTSP Pusat	5%	24.07%	-7.82%	161,200,000			161,200,000	30,460,300	129,424,800		
																Peningkatan partisipasi pelaku usaha diperoleh dari Jumlah Responden yang mengisi penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada PTSP Pusat tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.	Kendala memaailkan pelaku usaha mengisi SKM setelah selesai menerima layanan
065	ED	6481		Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha						54,563,000			54,563,000	12,963,238	5,312,500		
					Meningkatnya Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha K/L dan Pemerintah Daerah	1. Jumlah pemerintah daerah yg ditandatangani kinerjanya	100 Lembaga	-	-							Rapat perijinan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Peningkatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah yang rencananya diselenggarakan pada TW II 2026	-
						2. Jumlah rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Kerja Sama Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-							-	
065	ED	6777		Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Meningkatnya layanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko	1. Berencana pelaku usaha yang diberikan layanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko	75.01%	98.94%	95.44%	6,812,823,000			6,812,823,000	45,581,900	1,748,593,709		
																Peningkatan pelaku usaha yang diberikan layanan informasi diperoleh dari jumlah pelaku usaha penerima layanan dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk saat pendaftaran	Terdapat Pelaku Usaha yang tidak melakukan pembatalan atas pengambilan nomor antrian namun tidak memenuhi jadwal konsultasinya
065	ED	6782		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Meningkatnya efektivitas dan kemudahan perizinan berusaha sektor industri dalam mendukung realisasi penanaman modal	1. Peningkatan Nomor Kegiatan Usaha (NKG) sektor industri yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS)	5.01%	-	-	1,072,553,000			1,572,553,000	58,280,000	411,311,789		
						2. Peningkatan terselaksukannya permasalahan perizinan berusaha sektor industri melalui fasilitas dan pembinaan	85%	85.00%	85.00%							Pendampingan melalui fasilitas kepada pelaku usaha dan rapat koordinasi, verifikasi PKPRP Kondisi Tertentu, dan pengisian di Front Office PTSP Pusat	Pendampingan melalui fasilitas kepada pelaku usaha dan rapat koordinasi, verifikasi PKPRP Kondisi Tertentu, dan pengisian di Front Office PTSP Pusat
						3. Peningkatan pemahaman pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor industri	88.1%	-	-							-	-
065	ED	6783		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	Meningkatnya efektivitas dan kemudahan perizinan berusaha sektor non industri	1. Berencana Nomor Kegiatan Usaha (NKG) sektor non industri yang diterbitkan melalui layanan OSS	5.01%	60.56%	59.77%	648,296,000			648,296,000	126,401,092	87,883,500		
						2. Peningkatan terselaksukannya permasalahan perizinan berusaha sektor non industri melalui supervisi Online Single Submission (OSS)	75.11%	513.07%	449.48%							Jumlah Perizinan Berusaha Sektor Non Industri yang terbit dibandingkan dengan seluruh PB yang terbit melalui sistem OSS	Menurunya tingkat penerbitan Perizinan Berusaha sebagai dampak dari proses penyusunan proses bisnis pada sistem OSS dalam mengoptimalkan implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Komnas KBLI 2025.
						3. Peningkatan terselaksukannya permasalahan perizinan berusaha sektor non industri berbasis risiko melalui fasilitas perizinan berusaha	100%	513.07%	449.48%							Kegiatan Supervisi di daerah tidak dapat dilakukan sehingga supervisi dilakukan dengan mekanisme pemberian fasilitas kepada pelaku usaha	Perizinan berusaha terbitnya pada fasilitas melalui daring karena tidak tersedianya anggaran, hal ini menimbulkan risiko fasilitas berang karena penyelesaian masalah tidak selesai pada kesempatan pertama
						4. Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor non industri	89.02%	-	-							Kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025	Penyelesaian kendala terbitnya pada fasilitas melalui daring karena tidak tersedianya anggaran, hal ini menimbulkan risiko fasilitas berang karena penyelesaian masalah tidak selesai pada kesempatan pertama
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									8,864,976,000				8,864,976,000	3,804,401,139	2,315,792,814		
065	ED	3226		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					2,403,790,000				2,403,790,000	1,077,749,209	795,560,481		
					Berwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah I	1. Peningkatan capaian realisasi investasi di Wilayah I berdasarkan UKPM yang telah diverifikasi	91%	21.07%	21.52%							Hingga Semester I Tahun 2026, capaian realisasi di Wilayah I mencapai 138,58 Triliun atau 42.59% dari target tahun 2026	1. Kebijakan Monitoring RBAN 2. Kebijakan LSD 3. Investigasi Sangka PEN Mengalokasikan realisasi investasi di Sumatera terlahan

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EPISODI (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW I 2026 (Jan s.d. Mei) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
	KL	PROG														
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah I	91%	-	100.00%							Telah dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha : 1. PT CALYPTE SUGI POWER 1. PT Bimo Sakti Berastagi	Tidak ada Kendala
					3. Persentase fasilitas perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah I	91%	50.00%	37.50%							Telah terfasilitasi permasalahan kegiatan usaha pada: 1. PT. Tidar Kerinci Agung 1. PT. Bismata Alam Bata Dito.	Tidak ada Kendala
					4. Persentase fasilitas perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah I	81%	-	100.00%							Telah terfasilitasi permasalahan kegiatan usaha PSN pada PT Tianshan Alumina Indonesia	Fasilitas belum selesai karena masih ada kendala Lintas Insident
					5. Persentase Fasilitas Realisasi Investasi Sektor Industri Padat Karya	80%	-	-							Kegiatan Dummy	Kegiatan Dummy
065	ED	3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II						1,705,630,000			1,705,630,000	437,125,735	515,797,656		
				Berwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah II	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah II berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	23.65 %	25.99 %							Berdasarkan capaian realisasi investasi Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp. 144,09 triliun	-
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah II	91%	85.70%	80.00%							1. PT Millennium Sirih Jakarta Hotel 2. PT PRIMA ADHITAMA INTERNATIONAL DEVELOPMENT	Pengawasan hanya bisa dilakukan di Jakarta dengan adanya keterbatasan anggaran
					3. Persentase fasilitas perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah II	91%	60.00%	25.00%							1. PT Kobendito Cement 2. PT Klati Lestari	-
					4. Persentase Fasilitas pengembangan investasi berorientasi ekspor	80%	-	(mohon dicek)							-	-
065	ED	3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III						1,215,399,000			1,215,399,000	513,044,921	97,556,870		
				Berwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah III	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah III berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	25.95%	22.44%							-	-
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah III	91%	60.00%	25.00%							-	-
					3. Persentase fasilitas perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah III	91%	40.00%	133.33%							-	-
065	ED	3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV						1,343,132,000			1,343,132,000	1,030,553,524	104,203,442		
				Berwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah IV	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah IV berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	100%	30.13%							-	-
					2. Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 18 Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi	90%	-	-							-	-
					3. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah IV	91%	33.33%	25.00%							PT Freeport Indonesia, PT Anasamaya Resort Seminyak, PT Bulpermal Perakasa	-
					4. Persentase fasilitas perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah IV	91%	80.00%	60.00%							PT Nustite Indonesia, PT Industri Kereta Api (INKA), BLU Rumah Sakti Umum Daerah Malang Jati	-
065	ED	6761	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V						2,196,925,000			2,196,925,000	745,927,724	606,633,363		
				Berwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah V	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah V berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	91%	25.21%	39.55%							Capaian Realisasi Investasi di DW V di Triwulan II 2026	Tidak ada
					2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah V	91%	-	25.00%							1. Pengawasan Badan Usaha sebagai berikut: 1. PT. Rangka Indah Cemerlang	Tidak ada
					3. Persentase fasilitas perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah V	91%	33.00%	70.00%							1. Fasilitas Badan Usaha sebagai berikut: 1. PT Sinar Agro Malmur Lestari	Tidak ada
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL												5,524,080,000	398,413,450	292,776,863		
065	ED	3231	Berencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur						690,455,000			690,455,000	97,553,950	69,117,217		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	1. Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,41 dari Skala 4	-	-							Kegiatan tetap berjalan, Pelaksanaan survei dijadwalkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.	Efisiensi anggaran 2026 membuat ruang penyelesaian pekerjaan lebih terbatas
					2. Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,41 dari Skala 4	-	-							Kegiatan tetap berjalan, Pelaksanaan survei dijadwalkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.	Efisiensi anggaran 2026 membuat ruang penyelesaian pekerjaan lebih terbatas
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang SDA dan Industri Manufaktur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang SDA dan Industri Manufaktur	3,41 dari Skala 4	-	-							Kegiatan tetap berjalan, Pelaksanaan survei dijadwalkan untuk dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.	Efisiensi anggaran 2026 membuat ruang penyelesaian pekerjaan lebih terbatas
065	ED	3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan						2,220,523,000			2,220,523,000	121,804,000	57,792,860		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Jasa dan Kawasan	1. Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,41 dari Skala 4	(Indeks dihitung tahunan)	(Indeks dihitung tahunan)							Pada triwulan I telah dilaksanakan: - Proses selang jasi lainnya kegiatan Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi khusus Lokal Strategi	-
					2. Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,41 dari Skala 4	(Indeks dihitung tahunan)	(Indeks dihitung tahunan)							Pada triwulan I telah dilaksanakan: - Rapat peninjauan dengan Pemda Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi penyusunan PPI - Rapat peninjauan dengan BUPP KEK EKO Banten sebagai lokasi penyusunan PPI - Rapat peninjauan dengan Komdisi terkait penyusunan PPI	-
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,41 dari Skala 4	(Indeks dihitung tahunan)	(Indeks dihitung tahunan)							Pada triwulan I telah dilaksanakan: - Fasilitas layanan PT. Jakartamita Indonesia (J-Sentra) Lembang) terhadap pemenuhan perliminan lanjutan - Fasilitas layanan PT. Indonesia Morowali Industrial Park terhadap penyusunan KIKPR Borneo - Penetapan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 65.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 286 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Industri untuk Kemudahan Langkang Konstruksi	-
065	ED	3234	Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)						74,176,000			74,176,000	6,723,000	7,975,000		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	3,41 dari Skala 4	(Indeks dihitung tahunan)	(Indeks dihitung tahunan)							Pada triwulan I telah dilaksanakan: - Fasilitas layanan badan usaha di KEK Bitung (PT. Fishery International Indonesia) terkait pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan	-
065	ED	5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur						851,568,000			851,568,000	80,608,500	48,453,386		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Infrastruktur	1. Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal bidang infrastruktur	3,41 dari Skala 4	-	-							- Telah dilakukan rapat pendalaman dengan PT SAM, BPS, PDPPP (Kementerian Keuangan), dan Direktorat Fasilitas Berusaha - Telah dilakukan penyusunan KAI dan RAB penyurjaan langsung kegiatan Analisis Jarakak untuk alokasi jalan	-
					2. Indeks kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,41 dari Skala 4	-	-							- Telah dilakukan updatinf Informasi terhadap PPI yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya - Telah dilakukan identifikasi dan penajaman terhadap fokus dan lokasi untuk kegiatan PPI dan DPO	-
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,41 dari Skala 4	-	1							- Telah dilakukan rapat fasilitasi dengan Singapore Business Federation - Telah dilakukan rapat tindak lanjut koordinasi sistem logistik laut Jawa Tengah dengan Pelindo dan KTB	-
065	ED	5089	Fasilitas Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta						119,068,000			119,068,000	0	20,180,000		

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2025 (Januari-Maret) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW II 2025 (Jan s.d. Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EPISODI (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW I 2026 (Jan s.d. Mei) (Rp)	REALISASI ANGGARAN di TW II 2026 (Apr s.d. Jun) (Rp)	PENJELASAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI	
KL	PROG	KES															
				Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (RPBU)	3,41 dari Skala 4	-	-							-	Tetap dilakukan rapat dengan kantor bersama mengenai daftar rencana KPBU 2026 dan Tata Laksana Melaksanakan Rapat Pembahasan keberlanjutan Proyek PSEL Kota Tangerang dengan internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BBPM	
065	ED	7903	Perencanaan Makro Investasi						1,568,288,000				1,568,288,000	91,724,000	89,238,400		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Makro	1. Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Makro Investasi 2. Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal	3,4 dari Skala 4 3,4 dari Skala 4	-	-							Proses pengumpulan data dan informasi Keterbatasan akses untuk perolehan data yang dibutuhkan dalam kajian analisis makro		
															Telah dilaksanakan Rapat PAK 5 dan menunggu proses Harmonisasi Rperpres		
DEPUTI BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS																	
065	ED	6784	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi						2,001,685,000 302,863,000				2,001,685,000 302,863,000	65,136,668 37,751,230	522,575,466 61,935,954		
				Meningkatnya realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang Perkebunan dan Kehutanan	1. Nilai realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang perkebunan dan kehutanan 2. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Kelapa Sawit 3. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Kelapa	Rp 34,20 Triliun Rp 1,66 Triliun Rp 0,45 Triliun	Rp 25,80 Triliun Rp 16,30 Triliun Rp 0,56 Triliun	Rp 24,6 Triliun Rp 11,2 Triliun Rp 0,40 Triliun							Nilai realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang perkebunan dan kehutanan pada TW II 2026 adalah sebesar Rp 24,6 Triliun Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Kelapa Sawit pada TW II 2026 adalah sebesar Rp 11,2 Triliun Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Kelapa pada TW II 2026 adalah sebesar Rp 404 Miliar		
065	ED	7904	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perikanan dan Kelautan						379,435,000				379,435,000	720,000	80,299,071		
				Meningkatnya realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang perikanan dan kelautan	1. Nilai realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang perikanan dan kelautan 2. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Rempul Laut 3. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi garam 4. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Ikan TCT 5. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Tilapia 6. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi udang	Rp 1,13 Triliun Rp 0,53 Triliun Rp 8,62 Triliun Rp 0,61 Triliun Rp 0,52 Triliun Rp 0,46 Triliun	Rp 1,7 Triliun Rp 64,32 Miliar Rp 478,8 Miliar Rp 785,9 Miliar Rp 235,1 Miliar Rp 81,42 Miliar	Rp2,17 Triliun Rp167,3 Miliar Rp957 Miliar Rp830,4 Miliar Rp8,5 Miliar Rp218,2 Miliar							Capaian ini juga mencakup capaian 5 (lima) komoditas ikan TCT, Udang, Tilapia, Rempul Laut, dan Garam Pada periode TW II 2026 capaian realisasi komoditas Rempul Laut baru sebesar 43% Beberapa proyek yang telah diawali dan diidentifikasi baik dari sektor swasta maupun BUMN melakukan persiapan timeline pelaksanaan proyeknya mulai tahun 2027-2029 Pada periode TW II 2026 capaian realisasi komoditas Ikan TCT sudah sebesar 233% Pada periode TW II 2026 capaian realisasi komoditas Tilapia sudah mencapai 53% Pada periode TW I 2026 capaian realisasi komoditas Udang sudah mencapai 65%		
065	ED	7905	Pengembangan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi						455,671,000				455,671,000	0	80,027,897		
				Meningkatnya kualitas sistem Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Investasi Strategis	1. Penuntutan rencana aksi strategi dan tata kelola bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti	75% 20% 55%									- - -		
065	ED	7059	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi						234,010,000				234,010,000	0	66,611,713		
				Meningkatnya realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang Minyak dan Gas Bumi	1. Nilai realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang Minyak dan Gas Bumi 2. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Minyak Bumi 3. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Gas Bumi	Rp 7,2 Triliun Rp 19,84 Triliun Rp 23,40 Triliun	- Rp 13,6 Triliun Rp 4,1 Triliun	Rp2,89 T Rp5,97 T Rp4,86 T							Nilai realisasi penanaman modal hilirisasi investasi strategis bidang minyak dan gas bumi adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor hilirisasi minyak dan gas bumi di luar produk turunan petrokimia, roadmap dan pohon industri baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing Nilai realisasi penanaman modal hilirisasi investasi strategis komoditas minyak bumi adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor hilirisasi minyak bumi, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing Nilai realisasi penanaman modal hilirisasi investasi strategis komoditas gas bumi adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor hilirisasi gas bumi, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing		
065	ED	7060	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara						629,706,000				629,706,000	26,665,438	233,701,231		
				Meningkatnya realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang mineral dan batu bara	1. Nilai realisasi PMA/PMON hilirisasi investasi strategis bidang Mineral dan Batu Bara 2. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Nikel 3. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Industri Tembaga 4. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Bauxit 5. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Timah 6. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Pasir Silika 7. Nilai Realisasi PMA/PMON Hilirisasi Industri Logam Dasar	Rp 107,27 Triliun Rp 55,2 Triliun Rp 48,08 Triliun Rp 12,87 Triliun Rp 0,52 Triliun Rp 1,56 Triliun Rp 10,77 Triliun	Rp 1,0 Triliun Rp 41,5 Triliun Rp 30,7 Triliun Rp 13,7 Triliun Rp 2,5 Triliun Rp 1,9 Triliun Rp 17,0 Triliun	Rp 1,7 Triliun Rp 29,4 Triliun Rp 16,7 Triliun Rp 40,1 Triliun Rp 3,1 Triliun Rp 4 Triliun Rp 13,2 Triliun							Capaian ini juga mencakup capaian 6 (enam) komoditas non prioritas, yaitu Kobalt, Logam Tanah Berat, Batu Bara, Emas Perak, Mangan dan Apatit. Selain itu juga termasuk produk yang berasal dari multi komoditas Sampai dengan periode TW II 2026 capaian realisasi investasi komoditas Nikel sebesar 128,5% dari target RPJMN 2026 Sampai dengan TW I 2026 capaian realisasi investasi komoditas Tembaga sebesar 77,79% dari target RPJMN 2026 Sampai dengan TW I 2026 capaian realisasi investasi komoditas Bauxit sebesar 418,22% dari target RPJMN 2026 Sampai dengan TW I 2026 capaian realisasi investasi komoditas Timah sebesar 1064,41% dari target RPJMN 2026 Sampai dengan TW II 2026 capaian realisasi investasi komoditas Pasir Silika sebesar 375,77% dari target RPJMN 2026 Sampai dengan TW I 2026 capaian realisasi investasi komoditas Besi Baja sebesar 280,8% dari target RPJMN 2026	1. Kondisi prospektif dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran 1. Kondisi prospektif dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran 1. Kondisi prospektif dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran 1. Kondisi prospektif dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran 1. Kondisi prospektif dan ekonomi global 2. Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batu bara 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran	
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL																	
065	ED	6785	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						312,396,004,000 275,367,732,000				311,091,234,000 275,189,030,000	396,084,074 5,436,994	13,696,054,867 6,930,744,955		
				Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Persentase ketersediaan layanan sistem OSS RBA	95,1% 99,99%	99,99%	99,41 Persen							-	Persentase ketersediaan layanan sistem OSS RBA mencapai angka 99,41 %, data diambil dari terakhir uptime server OSS	Tidak ada kendala
				Meningkatnya kualitas sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Indeks kepuasan pengguna sistem perizinan berusaha Online Single Submission (OSS)	3,71 Indeks	-	0,00%							-	Indeks Kepuasan Pengguna Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) akan diisi pada akhir tahun sesuai hasil survei tahunan	Tidak ada kendala

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI OUTPUT TW I 2026 (Jan-Mar)	REALISASI OUTPUT TW II 2026 (Apr-Jun)	ALOKASI ANGGARAN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2026 (Jan-Mar) (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW II 2026 (Apr-Jun) (Rp)	ALOKASI ANGGARAN 2026 SETELAH EFGENSI (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I 2026 (Jan 1-6 Jun) (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW II 2026 (Apr 1-6 Jun) (Rp)	PENELAJAN CAPAIAN KINERJA	KENDALA YANG DIHADAPI
065	ED	6786	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan				35,772,239,000			34,648,177,000	305,418,000	6,653,498,047		
			Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan	1. Nilai Indeks Kematangan Teknologi Informasi/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.01 Skala 5	-	-				-	-	Saat ini pengukuran Indeks Kematangan Teknologi Informasi/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berada ke Indeks Pemerintahan Digital (Pendid) dan sedang dalam proses penulisan manual, sehingga capaian indikator <u>diapresiasi dan dilindungi</u> oleh <u>Teknologi Baru</u>	Pelaksanaan program mengalami penyesuaian skala prioritas akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran
				2. Tingkat ketersediaan layanan infrastruktur, jaringan dan keamanan informasi	99.50%	-	-				-	-	Regulasi Penyelidikan Layanan Komputasi Awan (Cloud), layanan pusat data (Data Rack Colocation, Penyelidikan Data Center) dan jaringan teknologi informasi (Sewa VPN IP, pemeliharaan LAN) sedang berlangsung, dan kegiatan pengapungan lisensi untuk layanan domain dan jaringan (DDI) serta layanan produktivitas pegawai (Office 365) sudah selesai dilakukan. Namun capaian indikator belum dihitung karena tingkat ketersediaan layanan diukur berdasarkan akumulasi kinerja layanan selama satu tahun	Pelaksanaan program mengalami penyesuaian skala prioritas akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan	1. Indeks kepuasan ketersediaan layanan teknologi informasi penanganan modal	3.6 Indeks	-	-				-	-	Indikator ini belum memiliki capaian pada Triwulan II karena pengukuran indeks kepuasan ketersediaan layanan teknologi informasi dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Namun, saat ini upaya peningkatan kualitas layanan elektronik dengan pemeliharaan perangkat sistem dan layanan internal di lingkungan Kementerian Investasi dan Efisiensi sedang dilakukan sebagai langkah persiapan pengukuran indeks kepuasan layanan teknologi informasi.	Pelaksanaan program mengalami penyesuaian skala prioritas akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran
065	ED	6787	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal				1,256,033,000			1,256,033,000	27,228,580	113,811,263		
			Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan informasi penanganan modal	1. Persentase pemahaman stakeholder terhadap data dan informasi penanganan modal	98.38%	-	-				-	-	-	-
				2. Persentase stakeholder yang memanfaatkan data dan informasi penanganan modal	96.5%	-	-				-	-	-	-
				3. Indeks Pembangunan Statistik Sektor	2.8 Indeks	-	-				-	-	-	-
			Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi penanganan modal	1. Indeks kepuasan pengguna layanan data dan informasi	3.43 Indeks	-	-				-	-	-	-
TOTAL							852,006,985,000			852,006,985,000	137,322,364,408	149,880,784,450		